

## BAB II

### TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tentara Nasional Indonesia membentuk dirinya sendiri melalui perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda ataupun Jepang. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan membuatnya melakukan kegiatan kesemestaan, tidak hanya bertempur secara fisik akan tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian Bangsa Indonesia. Keunikan inilah menjadikan peranan militer Indonesia menjadi tidak biasa. Penggalan sejarah kemerdekaan menjadi legitimasi bagi militer, tidak hanya menjadi instrumen pertahanan bangsa dari gangguan kekuatan luar, akan tetapi menjadi bagian penting dalam *political decision making*.

#### A . Sejarah Terbentuknya TNI

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 yang diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945, bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa para pemuda telah turun tangan untuk mengisi kekosongan itu dengan jalan membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang dikenal dengan nama "lasykar", tetapi mereka tidak punya senjata dan tak memiliki pemimpin yang berpengalaman dalam bidang kemiliteran. Oleh sebab

itu pemerintah harus menciptakan sebuah pasukan bersenjata yang dapat menegakkan kekuasaan dalam negeri.<sup>23</sup>

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP, dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan, BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu. Akhirnya, melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947, disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia, 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hal 11

<sup>24</sup> Soebijono, A.S.S.Tambunan, Hidayat Mukmin, Roekmini Koesoemo Astoeti, *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1991, Hal 15

## **B. Tugas Dan Peran TNI**

Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. Operasi militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
  - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata
  - 3) Mengatasi aksi terorisme
  - 4) Mengamankan wilayah perbatasan
  - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
  - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
  - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
  - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
  - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah
  - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Kemudian ayat (3) berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara<sup>25</sup>.

### **C. Keterlibatan Militer (TNI) dalam Diplomasi**

Peran serta militer dalam bidang politik luar negeri, termasuk perannya dalam diplomasi dapat diukur dari dua faktor, yakni faktor ancaman terhadap keselamatan negara dan bangsa, dan faktor keterlibatan militer dalam tugas-tugas internasional. Dari dua faktor ini selanjutnya dapat diketahui motivasi, bentuk dan sejauh mana keterlibatan TNI dalam politik luar negeri. Dari faktor tentang ancaman terhadap keselamatan Negara dan bangsa dapat dikemukakan dua peristiwa, yakni peristiwa pemberontakan PRRI / Permesta dan peristiwa Trikora.<sup>26</sup>

#### **1. Pemberontakan PRRI / Permesta**

Dalam menghadapi ancaman pemberontakan PRRI / Permesta, militer melakukan hubungan luar negeri secara terbatas dengan potensi-potensi asing

<sup>25</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/peran-dan-tugas-tni>, diakses pada 20 Juli 2010

<sup>26</sup> Dr Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri, Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, Hal 54

tertentu, yang oleh Nasution dinamakan "Diplomasi TNI". Dalam peristiwa pemberontakan PRRI / Permesta ini, TNI melakukan Diplomasi langsung dengan pihak-pihak luar negeri, tanpa sepengetahuan Menteri Luar Negeri Soebandrio, tetapi dengan pengetahuan dan izin Perdana Menteri H. Djuanda, yang pada saat itu kebetulan merangkap jabatan Menteri Pertahanan. Kebetulan pula Direktorat Khusus Kantor Perdana Menteri yang menangani masalah intelijen oleh Djuanda diserahkan kepada Nasution.<sup>27</sup>

Dalam peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta ini TNI-AD melakukan diplomasi langsung dengan pihak-pihak luar negeri. Peran serta ABRI dalam pelaksanaan politik luar negeri pada masa PRRI/Permesta mempunyai tiga aspek, aspek militer, aspek politik, dan aspek ekonomi. Dengan praduga bahwa Indonesia dan ABRI nya telah berorientasi ke komunis, Amerika Serikat berusaha membantu PRRI/Permesta secara politik dan militer. Secara diam-diam Amerika Serikat sebenarnya menginginkan agar Indonesia lebih memilih sistem federasi daripada negara kesatuan. Senjata-senjata, terutama artileri udara dijatuhkan dari pesawat *Catalina* diatas Pekanbaru sebelum ABRI mendarat disana. Sementara itu telah siap dua batalyon marinir Amerika di Singapura dengan dalih sedang cuti.

Namun pemberontakan dapat dipatahkan, mereka mundur beberapa langkah dan diplomasi mulai dilancarkan. Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution mengirimkan dua misi, misi Kolonel Achmad Yani dan misi Kolonel Gatot Subroto. Achmad Yani yang walaupun telah berhasil memimpin Operasi 17 Agustus di Sumatera Barat diperintahkan terlebih dahulu menggalang dan

---

<sup>27</sup>*Ibid Hal 55*

mengembangkan dialog dengan Amerika Serikat, melalui Mayor Benson, Asisten Atase Militer Amerika pada Kedutaan Besar Amerika di Jakarta.<sup>28</sup>

## 2. Operasi Trikora

Peran serta militer dalam politik luar negeri juga terpantau dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Setelah KMB tidak dapat menyelesaikan masalah Irian Barat, masalah tersebut menjadi terkatung-katung selama sepuluh tahun (1950-1960). Ternyata perjuangan memasukkan wilayah Irian Barat secara damai kedalam NKRI adalah dua kali lebih lama dari perjuangan perang kemerdekaan.

Masalah ini kemudian berturut turut diajukan ke Sidang Umum PBB dalam Sidang Sidang IX (1954), X (1955), XI (1956), (1957), tetapi semuanya gagal karena rancangan resolusi yang diajukan dan dirundingkan dalam Komite I tidak mampu mengumpulkan dua pertiga mayoritas suara yang dipersyaratkan. Dalam setiap debat di Sidang Umum, Amerika Serikat selalu bersikap *abstain*.

Habislah kesabaran Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat hanya melalui saluran Diplomasi. Persiapan persiapan untuk perjuangan secara fisik dilakukan. Pada akhir tahun 1957 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai wadah penghimpun segenap potensi nasional dalam persiapan merebut Irian Barat secara fisik. Dalam bulan Desember 1960 pemerintah Indonesia mengirimkan misi ke Uni Soviet, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional/KSAD Jenderal A.H. Nasution dengan anggota anggota misi antara lain Menteri Luar Negeri Subandrio dan Kepala Staf Angkatan Udara

---

<sup>28</sup> *Ibid* Hal 07

Laksamana Suryadarma. Tugasnya ialah mempercepat pelaksanaan persetujuan pembelian senjata dan peralatan dari Uni Soviet yang telah ada pada tahun 1958. Dengan datangnya senjata dan peralatan dari Uni Soviet seperti pesawat tempur MIG dan Pembom TU-16, kapal penjelajah dan kapal selam, tank dan perlengkapan tempur lain. Diharapkan dengan kekuatan tersebut, Indonesia mampu menandingi kekuatan tempur Belanda, terutama kekuatan armadanya yang sengaja dikirim ke Pasifik<sup>29</sup>.

Untuk kepentingan pembebasan Irian Barat, Pemerintah membentuk Komando Operasi tertinggi dibawah Panglima ABRI. Dalam kasus Irian Barat, adalah kekuatan angkatan perang dan mobilisasi umum yang menjadi salah satu penentu perginya Belanda dari wilayah itu. Indonesia saat itu memiliki antara lain 1 Skuadron pesawat pengebom strategis TU-16 KS dan berbagai macam pesawat tempur Mig, mulai dari Mig 15, Mig 17, Mig 19, sampai dengan Mig 21. Saat itu, peta kekuatan udara ini saja sudah merupakan alat utama sistim senjata udara yang diperhitungkan negara manapun di dunia ini, termasuk..negara seperti Belanda. Selain itu militer Indonesia masih ditunjang lagi dengan kekuatan armada tempur yang dimiliki oleh Angkatan Laut saat itu, misalnya sejumlah kapal selam, kapal perusak, hingga kapal penjelajah yang kesemuanya dalam keadaan siap-siaga dan berkemampuan penuh<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 23

<sup>30</sup> [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/c/c2/KRIDiponegoro\\_3.jpg/300px-KRIDiponegoro\\_3.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/c/c2/KRIDiponegoro_3.jpg/300px-KRIDiponegoro_3.jpg) diakses pada 31 Juli 2010

## D. Perkembangan Militer Indonesia

### 1. Era Soekarno

Pemenuhan Alutsista bisa dikatakan cukup menonjol pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno. Ketika itu TNI dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya merebut dan mempertahankan NKRI yang baru diproklamasikan. Penonjolan tersebut terutama pada Matra AL dan AU, kemudian menyusul pemenuhan Alutsista AD. Pengadaan kapal perang secara besar-besaran terjadi sehubungan dengan eskalasi ancaman yang meningkat di perairan Selat Malaka dan Laut Arafuru dalam pelaksanaan Operasi Dwikora dan Trikora, pemenuhan Alutsista itu terjadi antara tahun 1950-1960<sup>31</sup>.

Pada awal 1960-an, Indonesia sempat menjadi *New Emerging Forces* di Asia. Ketika itu TNI diperkuat oleh peralatan militer tercanggih buatan Uni Soviet seperti jet pemburu MIG-17 Fresco dan MIG-21 Fishbed, rudal anti pesawat SA-2 Guideline, pembom Long Range TU-16 Badger, Kapal Selam kelas Whisky, Kapal Fregat kelas Riga, hingga kapal penjelajah KRI Irian. Bahkan saat periode konfrontasi dengan Malaysia, Armada TU-16 berani bertandang ke *Air Space* Malaysia Utara dan Australia tanpa ada intersepsi. Tidak tinggal diam, Malaysia dan Singapura yang ketika itu tergabung dalam Persekutuan Melayu meminta payung perlindungan Inggris dan Australia. Untuk selanjutnya menempatkan armada pesawat tempurnya di Butterworth.<sup>32</sup>

Pada tahun 1962, Angkatan Perang dan Polri disatukan dalam satu wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Presiden Soekarno

---

<sup>31</sup>*ibid*, Hal 07

<sup>32</sup>*Ibid Hal 22*

menghendaki agar Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Pada masa pemerintahan Soekarno ciri *soft politics* memang dilakukan pada masa awal awal kemerdekaan dan ini ditunjukkan antara lain dengan adanya berbagai perjanjian perdamaian antara Indonesia dengan Belanda. Namun tetap saja kekuatan militer pada saat itu tetap disiagakan untuk menjaga kedaulatan negara.<sup>33</sup> Pada masa pemerintahan Soekarno, keadaan situasi dalam negeri maupun internasional mempengaruhi kebijakan pemerintah yang saat itu untuk memperkuat militer karena adanya berbagai pemberontakan di daerah-daerah, dan dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Hal tersebut dapat kita lihat pada dua peristiwa diatas, yang mana militer Indonesia melakukan pembelian secara besar besaran peralatan tempur dari Moskow. Upaya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, dan ini berkaitan dengan modernisasi peralatan militer dan kemampuan personil. Pada masa ini militer Indonesia konon memiliki kekuatan yang begitu besar dan modern pada masanya<sup>34</sup>.

## **2. Era Soeharto / Orde Baru**

Pada masa Orde Baru kebijakan pertahanan lebih bersifat mengamankan kepentingan internal melalui kebijakan luar negeri yang mendukung diplomasi sebagai resolusi damai. Dengan kebijakan politik semacam ini, maka kekuatan militer dibangun menurut perspektif tersebut. Secara keseluruhan, konsentrasi pertahanan negara pada masa Orde Baru tetap bersifat internal<sup>35</sup>.

Soeharto menempatkan militer sebagai bagian penting dari alat melanggengkan dan memperluas kekuasaannya. ABRI (TNI) dijadikan instrumen

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Hal 23

<sup>34</sup>*Ibid*, Hal 28

<sup>35</sup>*ibid*, Hal 23

penting dalam menjaga kebijakan yang dijalankan oleh Orde Baru. Dengan dalih menjaga stabilitas, Soeharto memberikan banyak peran istimewa, menempatkan banyak perwira militer sebagai Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, Irjen dan lain-lain.<sup>36</sup> Kondisi ini menyebabkan militer menjadi institusi yang justru melakukan kontrol penuh terhadap kehidupan sipil. Sebagai dampaknya, TNI terjerumus dan terseret dalam politik kekuasaan Orde Baru. Hal tersebut menyebabkan TNI menjadi tidak profesional dan tidak mampu menjalankan fungsinya dalam bidang pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Akomodasi politik militer bergeser menjadi dominasi ketika Soeharto berkuasa. Militer adalah tulang punggung pemerintahan Orde Baru, dan melalui program ideologi dan budayanya, dominasi berubah menjadi hegemoni. Praktek Dwi Fungsi ABRI dijalankan dalam beberapa pola;

*Pertama*, politik sentralisasi ditangan eksekutif. Pemerintahan Orde Baru mengorientasikan diri kepada negara kuat ( *strong state* ), untuk membangun negara yang kuat itu, Orde Baru membangun elite penguasa yang terdiri dari militer, birokrat, teknokrat dan pemilik modal. Politik sentralisasi menyebabkan perasaan tertekan dan tertindas, rakyat putus asa dan menerima apa saja yang diputuskan atau dikatakan pemerintah pusat. Keadaan ini tidak mendukung perkembangan kehidupan *civil society* dan pembangunan politik, khususnya demokrasi, dan sebaliknya cenderung melahirkan *political decay*.

---

<sup>36</sup> *ibid*, Hal 07

*Kedua*, pendekatan keamanan menjadi ciri yang menonjol. Orde Baru menterjemahkan lebih lanjut pendekatan keamanan dengan memberikan tanggung jawab tersebut kepada ABRI. Tanggung jawab tersebut menjadikan ABRI bertindak " agresif " terhadap semua yang dianggapnya membahayakan stabilitas, dan stabilitas sendiri dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Karena ABRI berperan sangat besar dalam keamanan, maka hal ini menempatkan ABRI dalam posisi sentral dan menjadi ujung tombak dalam memutuskan hal-hal menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Ketiga*, dominasi militer dengan pendayagunaan dan perluasan Dwi Fungsi ABRI. Untuk menguatkan sentralisasi kekuasaannya, tentara digunakan untuk mendominasi jabatan-jabatan politik strategis dan membenarkan campur tangan tentara dalam politik. Pada akhir 1970-an, separuh anggota kabinet dan dua pertiga jabatan Gubernur dijabat oleh militer. Sampai dengan tahun 1998, sebanyak 4000 anggota militer menduduki posisi jabatan sipil. Keterlibatan militer dalam birokrasi lokal selain melalui jabatan Bupati dan Gubernur adalah keterlibatan pimpinan militer melalui Muspida dan Muspika yang berfungsi mengendalikan kehidupan masyarakat daerah terutama dalam kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi rakyat untuk pembangunan dan untuk Pemilihan Umum.<sup>37</sup>

Pada Pemerintahan Orde Baru, militer tidak hanya mendominasi peran sosial politik, akan tetapi tentara sangat leluasa menjalankan praktek-praktek bisnis militernya secara legal dengan ditetapkannya UU Yayasan No.16 tahun

<sup>37</sup> Soebijono, A.S.S Tambunan, Hidayat Mukmin, Roekmini Koesoemo Astoeti, *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1991, Hal 102

2001<sup>38</sup>. Kecilnya anggaran militer khususnya untuk kesejahteraan prajurit dijadikan alasan kuat praktek ini. Akan tetapi dalam realitanya, praktek bisnis militer hasilnya hanya dinikmati pada tataran perwira saja. Hampir 52 tahun bisnis militer berlangsung, akan tetapi sekian lama bisnis itu dilakukan tanda-tanda kesejahteraan prajurit pun tidak menunjukkan perubahan, ada kesenjangan yang amat tajam antara kesejahteraan kopral dengan jenderal<sup>39</sup> Kondisi demikian menyebabkan terjadinya pergeseran cara pandang prajurit TNI yang semula berorientasi aspek pertahanan dan keamanan menjadi berorientasi pada politik praktis, jabatan-jabatan politik, bahkan kepentingan bisnis yang tidak selamanya konsisten dengan misi utama tentara sebagai penjaga kedaulatan negara.

Ditengah baiknya hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat, Tentara Nasional Indonesia mendapatkan embargo dari Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini terjadi setelah peristiwa kerusuhan di Timor timur yang dikenal dengan Insiden Santa Cruz pada 12 November 1991 yang menewaskan sekitar 200 orang<sup>40</sup>.

Namun terlepas dari semua itu, ada segi positif dengan kuatnya militer pada masa rezim Orba ini, yaitu kekuatan TNI (ABRI) pada saat itu merupakan salah satu kekuatan yang cukup disegani oleh negara tetangga, dilihat dari segi jumlah personil dan Alutsista TNI pada saat itu, seperti F-16 buatan Amerika Serikat. Sehingga pada masa ini, Diplomasi Indonesia mengalami kemajuan yang sangat berarti, hal ini dapat kita lihat dengan berperan aktifnya Indonesia di pentas

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal 113

<sup>39</sup> Yuddy Crisnandy, *Reformasi TNI*, Jakarta, LP3ES, 2005, Hal 127

<sup>40</sup> <http://www.sejarahtni.mil.id/index.php?show=script&cmd=loadnews&newsid=3355>, diakses pada 19 Agustus 2010.

politik Internasional, seperti penyelesaian kasus Kamboja, misi perdamaian di Bosnia Herzegovina, serta aksi kegagalan pembajakan pesawat Garuda oleh pasukan elit TNI, yang pada saat itu mendapatkan perhatian luas dari masyarakat internasional, sehingga TNI menjadi salah satu kekuatan yang cukup disegani. Pada masa Pemerintahan Orde Baru juga jarang terjadinya kasus kasus yang menyangkut pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara lain.<sup>41</sup>

### 3. Era Reformasi

Tidak mengherankan setelah Soeharto lengser, pemerintahan berikutnya menanggung beban berat untuk memperbaiki kondisi perekonomian pasca krisis moneter 1997. Dampaknya jelas berpengaruh bagi pemenuhan kelengkapan Alutsista TNI. Kebijakan yang ditempuh Presiden B.J Habibie, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, dan Soesilo Bambang Yudhoyono hanya bersifat parsial dan sesuai kebutuhan. Bisa dikatakan kondisi riil alutsista TNI hingga saat ini sangat memprihatinkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena secara umum Alutsista TNI yang layak digunakan hanya 60 persen<sup>42</sup>.

Setelah tergulingnya Rezim Orde Baru, peranan politik, sosial maupun ekonomi TNI lambat laun mulai dikurangi, sehingga militer tidak lagi menjadi kekuatan dominan sebagaimana halnya pada masa Rezim Orde Baru. Mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan masyarakat dikarenakan kegagalan dalam memperbaiki krisis yang terjadi berdampak pada pengurangan peran militer, terutama peran politik dan ekonomi yang selama masa Orba begitu besar. Militer di era reformasi tidak lagi menjadi kekuatan yang mendominasi

---

<sup>41</sup> Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan*, Narasi, Yogyakarta, 2005, Hal 380

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 375

hubungan sipil militer. Meski begitu, surutnya peran politik militer tidak mempengaruhi daya tawar militer terhadap kebijakan pemerintahan sipil. Kekuatan sipil mulai berada pada posisi yang seimbang dengan kekuatan militer dalam menentukan proses kebijakan politik. Secara formal, militer tidak lagi dilibatkan dalam urusan politik, namun secara faktual pengaruh militer diperlukan kekuatan politik sipil untuk mendukung agendanya<sup>43</sup>.

### 1. Era B.J Habibie

Pemerintahan B.J. Habibie juga disebut sebagai pemerintahan transisional. Setidaknya seperti dikemukakan Habibie sendiri, pemerintahannya dimaksudkan untuk menghantarkan masyarakat Indonesia agar dapat keluar dari krisis dengan Pemilu 1999 sebagai salah satu parameternya<sup>44</sup>. Militer sendiri pada saat ini berperan penting dalam masa proses transisi dari Rezim Orde Baru ke Masa Reformasi. Mundurnya Soeharto digantikan Habibie membuat masyarakat khususnya LSM dan mahasiswa, semakin keras mendengungkan reformasi militer yang meminta pemerintah dan DPR segera mencabut Dwi Fungsi ABRI yang telah menimbulkan banyak masalah dan menghambat demokratisasi. Ada beberapa kebijakan yang perlu dicatat selama Habibie menjalankan pemerintahannya, diantaranya yaitu :

#### a. TNI kembali ke Barak

Penataan masalah pertahanan dan keamanan serta perubahan paradigma militer.

---

<sup>43</sup> Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan*, Narasi, Yogyakarta, 2005, Hal 378

<sup>44</sup> B. Wiwoho, *Untuk Presiden Habibie, Menyapulah dengan Sapu yang Bersih*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta 1998, Hal 21

Hal ini membuat militer Indonesia kembali pada tugas awalnya yaitu sebagai lembaga pertahanan negara dengan kembali ke Barak. Penataan kembali peran militer dengan semangat menciptakan militer yang profesional dengan fokus pada masalah pertahanan pada era reformasi mengalami pasang surut. Pada pemerintahan Habibie mulai dilakukan pembenahan formal pada keistimewaan militer, walaupun pertimbangannya lebih pada kewajiban atas desakan reformasi dibandingkan dengan *political will* pemerintah. Salah satu langkah penting yang terjadi adalah mengurangi jatah militer dilembaga MPR, DPR dan DPRD.

Desakan masyarakat yang begitu kuat memaksa pula internal militer melakukan berbagai perubahan diantaranya, rencana awal pemisahan struktur TNI dan POLRI, dikeluarkannya keputusan Mabes TNI terkait dengan paradigma baru peran TNI, serta perubahan nama ABRI menjadi TNI yang merupakan agenda reformasi internal militer, perubahan nama ABRI menjadi TNI sebagai upaya mengubah citra militer Indonesia, karena nama ABRI lebih berkonotasi pada *security approach* sementara TNI lebih mempunyai latar belakang historis dengan kedekatannya dengan rakyat<sup>45</sup>.

#### b. Lepasnya Timor Timur

Ketika Habibie menjabat sebagai Presiden hampir tidak ada hari tanpa demonstrasi. Demonstrasi itu mendesak Habibie untuk merespons tuntutan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan terkadang lebih maju dari tuntutan reformasi itu sendiri. Habibie pun merespons tuntutan Otonomi Khusus (luas) Timor Timur, lebih maju dari tuntutan alias kebablasan menjadi

---

<sup>45</sup> Yuddy Crisnandi, *Reformasi TNI*, LP3ES, Jakarta, 2005, Hal 94

referendum dengan opsi merdeka. Propinsi termuda Indonesia kala itu, yang direbut dan dipertahankan dengan susah payah pada masa pemerintahan Soeharto akhirnya dilepas. Dari sekian banyak sepak terjang yang dilakukan oleh Habibie pada masa pemerintahannya, kasus lepasnya Timor Timur agaknya menjadi sesuatu kesalahan fatal seorang presiden yang sesungguhnya telah bersumpah dan berkewajiban mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca referendum tersebut terjadi kerusuhan, yang menyebabkan jatuhnya korban di pihak sipil. TNI sebagai pihak yang memegang otoritas pada saat itu, dituduh mendalangi terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa masyarakat sipil. TNI dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat selama menjalankan tugasnya pada masa referendum di Timor Timur. Kejadian ini mencoreng muka Indonesia dan TNI di mata masyarakat internasional.

Setelah terjadinya kerusuhan berdarah pasca jajak pendapat di Timor Timur, hal tersebut membuat Kongres Amerika Serikat pada tahun 1999 mengeluarkan *Leahy Amandment*, yang berisi embargo total terhadap militer Indonesia. Inti *Amandement* itu adalah mensyaratkan bahwa bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia dapat diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat apabila pemerintah RI dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur. Sebenarnya pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan embargo terhadap militer Indonesia pasca terjadi pembunuhan massal di Santa Cruz, Dili, 12 November 1991 yang menelan korban sekitar 200 pemuda Timor Timur itu membuat Amerika berang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat sontak

menghentikan program pendidikan dan latihan militer internasional untuk para perwira Indonesia.

## **2. Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur**

Hal yang pertama dilakukan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi Presiden adalah penataan institusi militer, dengan memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Seperti diketahui, selama puluhan tahun era Orde Baru pucuk pimpinan angkatan bersenjata dipegang oleh satu orang yakni Menhankam/Pangab (Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI). Pemisahan ini dimaksudkan untuk membatasi militer dari persoalan internal negara, dengan posisi pertahanan yang mengkonsentrasikan militer untuk mengurus setiap bentuk ancaman atau intervensi dari negara lain.

Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid merupakan masa dimana konstelasi konflik sipil militer paling tinggi, dan diduga merupakan salah satu penyebab lengsernya Gus Dur sebagai presiden. Pada Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, TNI lebih banyak melakukan perubahan internal. Tak banyak perubahan yang dialami oleh TNI dalam masalah kekuatan atau pembaharuan terhadap Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Reformasi militer terkait peran militer pada masa K.H. Abdurrahman Wahid memiliki beberapa terobosan baik bersifat substansial ataupun operasional<sup>46</sup>.

Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, kalangan petinggi militer saat itu “menentang” intervensi presiden dalam manajemen internal TNI.

---

<sup>46</sup> A. Malik Haramain, *Gus Dur Militer dan Politik*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hal 359

Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid melakukan banyak perubahan yang dianggap radikal seperti pemisahan Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta menempatkan pejabat sipil pada Kementerian Pertahanan. K.H. Abdurrahman Wahid juga melakukan kebijakan mutasi besar-besaran didalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Pemisahan Kementerian Pertahanan (Menhan) dan Kementerian Keamanan, Mengangkat tokoh-tokoh sipil untuk jabatan Menteri Pertahanan, Penegasan pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah langsung lembaga kepresidenan<sup>47</sup>.

### 3. Era Megawati Soekarno Putri

Era Pemerintahan Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu masa yang penting bagi sejarah Militer Indonesia. TNI yang sebagian besar Alutsistanya merupakan buatan Amerika Serikat, akhirnya mulai berpaling ke Russia. Hal ini dilakukan setelah TNI mendapatkan embargo total yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, karena TNI dituding melakukan pelanggaran HAM pasca referendum di Timor Timur. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dilakukan imbal beli Pesawat Tempur Sukhoi Su-27 dan Su 30 dan dua Helikopter Mig-35. Dalam pembelian dua unit Pesawat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30, serta dua unit Helikopter MI-35, yang bernilai sekitar Satu Triliun Rupiah, dibayar dengan uang muka 12.5% dan sisanya diangsur selama 24 bulan berupa imbal dagang produk pertanian Indonesia seperti kedelai dan kelapa sawit. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari kunjungan Presiden Megawati ke Russia, yakni dengan adanya perjanjian pembelian dua unit pesawat Sukhoi jenis

---

<sup>47</sup> *Ibid, Hal 23*

SU-27 dan SU-30 dan dua unit helikopter MI-35 yang ditandatangani oleh, Rini Suwandi sebagai *project officer* yang ditunjuk oleh Sudar S.A sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri sekaligus juru runding RI dalam pembelian tersebut, dan Dirut Bulog, Widjanarko Puspayu, disaksikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 22 April 2003 di Moskōw.<sup>48</sup> Adapun pengadaan pesawat dan helikopter tersebut masih terbilang sangat kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah dan tingkat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, serta belum dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan memadai.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri juga dilakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush tentang rencana pencabutan embargo terhadap Militer Indonesia. Amerika Serikat menegaskan akan mencabut embargo penjualan peralatan militer kepada Indonesia dan berjanji akan memberikan bantuan dana sebesar US\$10 juta bagi pelatihan polisi RI. Penegasan yang disampaikan oleh Presiden AS George W Bush tersebut tertuang dalam pernyataan bersama dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, usai keduanya bertemu di Ruang Oval Gedung Putih, Washington DC. Menko Polkam pada masa itu Soesilo Bambang Yudhoyono, mengatakan peralatan pertahanan yang dicabut embargonya tersebut ditekankan pada peralatan-peralatan yang tidak mematikan (*nonlethal defense articles*).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> <http://www.detiknews.com/read/2004/01/29/141033/1289024/10/imbali-beli-pesawat-sukhoi-megawati> diakses pada 25 Juli 2010

<sup>49</sup> <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8585>, diakses pada 13 Agustus 2010

#### 4. Era Soesilo Bambang Yudhoyono

Banyak pihak khawatir ketika Letjen Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden, akan mengembalikan dominasi militer dalam perpolitikan Indonesia. Namun kekhawatiran yang ada tidak terlalu besar, dikarenakan figur SBY sendiri yang dikenal sebagai perwira militer yang moderat dan mendukung penghapusan Dwi Fungsi ABRI serta perkembangan demokratisasi yang sangat pesat, yang tidak memberikan celah besar kepada militer untuk tampil dominan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti masa Orde Baru. Hubungan pemerintah dengan militer pada masa ini berada pada posisi stabil, kebijakan yang diambil pemerintah dalam memperbaiki lembaga militer tidak menimbulkan gejolak yang besar, hal ini juga terkait ketidakmampuan militer melakukan penolakan atas desakan masyarakat agar militer fokus dalam masalah pertahanan dan tidak memiliki peran lain yang semakin hari semakin besar.

Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono tampaknya lebih berorientasi pada pembangunan sektor ekonomi menjelang Pemilu 2009, dan ada keyakinan melalui politik diplomasi yang selama ini dikembangkan pemerintah, bahwa negara-negara kawasan akan menjamin keamanan Indonesia.<sup>50</sup> Pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, akhirnya embargo terhadap militer Indonesia dicabut dan dipulihkan kembali oleh Amerika Serikat yaitu pada tahun 2007, sehingga TNI dapat kembali menata peranan dan kekuatannya.

---

<sup>50</sup> <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7944> diakses pada 18 Agustus 2010

Dilihat dari perjalanan militer Indonesia dari Era Soekarno sampai dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, militer memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Posisi militer di setiap masing-masing periode pemerintahan disesuaikan dengan karakter kepala pemerintahan dan tuntutan yang berkembang pada setiap era nya. Militer Indonesia juga mempunyai mempunyai peran diluar masalah pertahanan dan keamanan, seperti peran sosial, politik maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan faktor internal terkait dengan faktor sejarah dan persepsi kompetensi, serta faktor eksternal terkait dengan kemampuan elit sipil dalam mengelola bangsa khususnya masalah pertahanan demi terjaganya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.